

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK PEMBANGUNAN KOTA BARU DAN PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Soma Atmaja¹ dan Andi Azikin²

¹Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

²Dosen Program Studi Kebijakan Pemerintahan IPDN

E-mail:

ABSTRAK. Berawal dari posisi strategis Kabupaten Tangerang sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta, kemudian berkembang menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), menjadikan daerah ini berperan sebagai pusat Industri, perdagangan dan jasa. Maka tumbulah pemukiman-pemukiman berskala besar sebagai kota baru di Kabupaten Tangerang ini. Hadirnya peran pemerintah daerah dengan fungsi pelayanan, pembangunan dan Pemberdayaan (Ryas Rasyid, 2001), begitu sentral sebagai agen perubahan. Terlebih, kehadiran kota-kota baru tersebut menyisakan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, dan membuat perubahan sosial yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pembangunan kotabaru-kota baru dan menganalisis bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam menanggulangi dampak pembangunan kota baru serta perubahan sosial di Kabupaten Tangerang. Sehingga dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif dengan teknik analisis Triaguasi yaitu perpaduan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan secara terus menerus, kemudian dianalisis sehingga kajian ini dapat dibuat penarikan kesimpulan (*conclusion, drawing/verivication*) dan rekomendasi sebagai sebuah saran penelitian. Hasil kajian ini memberikan kesimpulan bahwa pembangunan kota baru di Kabupaten Tangerang hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan. Kualitas sumber daya manusia masyarakat terdampak kota baru masih tertinggal yaitu pembangunan kota baru bukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Walaupun peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat sudah cukup kuat dengan upaya yang beragam. Walhasil, pembanguan kota baru berubah secara radikal kelembagaan masyarakat, sistem sosial dan pola perilaku masyarakat. Pembangunan kota baru menghadirkan kulturasi global di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah daerah; dampak pembangunan; perubahan sosial

THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE IMPACT OF NEW CITY DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGING IN TANGERANG REGENCY, BANTEN PROVINCE

ABSTRACT . Starting from the strategic position of the Tangerang Regency as a buffer for the Capital City of DKI Jakarta, it later developed into a part of the Greater Jakarta Metropolitan Area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi), making this region a role as a center for industry, trade and services. Then grow large-scale settlements as a new city in Tangerang Regency. The presence of the role of local government with the function of service, development and Empowerment (Ryas Rasyid, 2001), is so central as an agent of change. Moreover, the presence of these new cities left a socioeconomic impact on the surrounding community, and made extraordinary social changes for the people of Tangerang Regency. The purpose of this study is to analyze the development policies of new cities and analyze how the role of the Tangerang District Government in increasing the capability of the community in tackling the impacts of new city development and social change in the Tangerang Regency. So by using a qualitative research methodology that uses descriptive analysis techniques Triaguasi namely a combination of interviews, documentation and observations carried out continuously, then analyzed so that this study can make conclusions (*conclusions, drawings / verivication*) and recommendations as a research suggestion. The results of this study conclude that the construction of new cities in Tangerang Regency only increases economic growth, not equity. The quality of human resources affected by the new city is still lagging behind, namely the development of the city, not for the welfare of the surrounding community. Although the role of the local government in empowering the affected people's economy to improve the capabilities of the community is already strong enough with diverse efforts. As a result, the construction of new cities radically changed community institutions, social systems and patterns of community behavior. New city development presents global culture in Tangerang Regency, Banten Province.

Key words: Role; local government; development impact; social change

PENDAHULUAN

Kajian ini diawali dari pernyataan seorang pakar ekonomi Todaro dan Smith (2009) yang berkata: “mengapa kemakmuran berdampingan dengan kemiskinan yang parah, tidak hanya di benua yang berbeda tetapi justru di negara yang sama atau bahkan di kota yang sama?”. Sebuah fenomena yang menggambarkan bagaimana kehidupan setengah penduduk bumi dalam kemiskinan dan ironisnya, mereka hidup berdampingan dengan penduduk kaya, menjadi aspirasi penulis untuk mengkaji lebih mendalam pembangunan kota baru dengan skala besar yang berkembang sebuah wilayah.

Apa yang disimpulkan Todaro dan Smith tersebut adalah bahwa dalam pengalaman banyak negara dan pemerintahan, akan selalu ada kesenjangan. Kesejahteraan sebagai *outcomes* dari rentetan panjang pembangunan seringkali menyisakan kelompok-kelompok marginal. Bagaimana dengan pembangunan di Kabupaten Tangerang? Adakah pembangunan yang dilakukan sudah ber-muara kepada kesejahteraan? Bagaimana dengan perubahan sosial yang terjadi akibat pembangunan itu? Apa dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat pembangunan yang terjadi?

Perkembangan industri di Kabupaten ini begitu pesat karena diharapkan mampu menyerap kebutuhan tenaga kerja setiap tahun yang semakin tinggi. Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 29 Kecamatan hampir seluruhnya terbangun kawasan-kawasan industri. Dari mulai industri berat, sedang dan ringan sampai kepada perkembangan industri perumahan. Dampak pertumbuhan industri dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir merubah wajah Kabupaten Tangerang dari wajah pedesaan yang hijau menjadi wajah industri yang “keras” berbalut polutan. Akibat pertumbuhan industri tersebut, karena kebutuhan akan akses dan distribusi barang dan jasa terbangun pula jalan tol yang menghubungkan DKI Jakarta ke ujung barat pulau Jawa (Kota Cilegon) yang melintas dan/ membelah wajah Kabupaten Tangerang menjadi utara dan selatan.

Pada akhirnya kehadiran industri dan proses industrialisasi menyuguhkan lingkungan yang terpapar polusi. Air sungai yang menampung buangan limbah kimia, air tanah yang tersedot habis, tanah yang beracun karena industri tanpa IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan udara yang tidak lagi segar karena paparan jutaan metrik ton karbon dioksida di batas langit dan cakrawala. Inilah warisan yang harus diselesaikan generasi berikutnya.

Kabupaten Tangerang sebagai sebuah daerah yang sedari awal diproyeksikan sebagai wilayah

industri pada akhirnya menerima dampak sekaligus manfaat dari tuntutan yang begitu besar kebutuhan pemukiman. Akibatnya tumbuhlah pemukiman-pemukiman besar dan kecil di hampir seluruh wilayah ini dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir. Pertumbuhan pemukiman skala besar dan kecil tumbuh menjamur di segala pelosok dan penjuru karena dibutuhkan oleh masyarakat. Sebuah konsekuensi logis dari daerah yang tengah berkembang menjadi pusat industri dimana tingkat migrasi terdongkrak naik menurut deret ukur. Tidak ada yang salah dengan itu, kecuali konsekuensi lainnya tanah-tanah pertanian yang semula menghijau berganti dengan tembok-tembok beton perumahan dan pemukiman.

Dengan maraknya perumahan dan pemukiman menuntut penyediaan sarana-sarana pendidikan yang memadai. Pendidikan pra sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah sampai kepada Perguruan Tinggi menjadi keniscayaan yang harus ada dan terus berkembang di wilayah ini. Proses pembangunan sekolah-sekolah ini pada akhirnya selalu tertinggal dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan migrasi yang begitu tinggi. Tingginya anggaran pembangunan di bidang pendidikan dalam prakteknya juga belum tentu sebanding dengan kualitas pendidikan yang ada. Hal ini tentu saja menjadi ironi pembangunan yang harus dicermati dan dikaji ulang agar apa yang sudah dilakukan tidak sia-sia dan mendapat hasil yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat menjadi standar bagi terciptanya masyarakat sejahtera. Perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan dan teknologi berakibat sangat mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Dengan kata lain bahwa pembangunan kota baru hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan kenaikan produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi pada suatu daerah. LPE Kabupaten Tangerang berada pada kisaran 6,17% sampai dengan 6,32% pada periode 2012-2016, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Real Estate berada pada peringkat kelima atau menyumbang 6,16%. Masalah kesenjangan ekonomi antara penghuni kota baru dengan daerah di sekitarnya masih menyisakan masalah untuk diselesaikan. Dari Angkatan Kerja 1,51 juta orang yang bekerja berjumlah 1,38 juta orang, sehingga Tingkat Pengangguran masih berada pada angka 9% dan para Pencari Kerja sebesar 136.277 orang pada tahun 2015. Jelas ada kesenjangan yang nyata antara kehidupan di kota baru dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat terdampak kota baru masih tertinggal. Dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,23 tahun bukan angka yang menggembirakan untuk berdaya saing di tengah tuntutan hidup yang semakin tinggi. Sehingga masih ada 5,71% sampai dengan 5,29% penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2012-2016. Dimana mereka tidak mampu hidup pada rentang pendapatan antara Rp. 326.724 sampai dengan Rp. 405.902 per bulan pada kurun waktu tersebut.

Pembangunan kota baru bukan untuk masyarakat sekitar. Secara teoritis, pembangunan kotabaru seharusnya untuk memenuhi masyarakat sekitar karena pertumbuhan penduduk (*overspill population*). Namun secara sadar pembangunan kota baru justru diperuntukkan bagi para penduduk yang bermigrasi ke Kabupaten Tangerang. Sehingga beban Pemerintah Daerah untuk memenuhi pemukiman yang layak bagi penduduknya masih tetap tinggi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah kajian ini (1). Bagaimana peran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam menanggulangi dampak pembangunan kota baru? Dan (2). Bagaimana dampak pembangunan kota baru terhadap perubahan sosial?

Metode Kajian dan Kerangka Pemikiran

Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik analisis Triaguasi yaitu perpaduan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan secara terus menerus

sampai data dimaksud menjadi jenuh dan variasi data yang tinggi, kemudian dianalisis dengan penyajian data (*data display*), *flowchart*, grafik dan matrik, sehingga kajian ini dapat dibuat penarikan kesimpulan (*conclusion, drawing/verivication*) berupa kesimpulan-kesimpulan penelitian sekaligus dapat memberikan rekomendasi sebagai sebuah saran penelitian.

Kajian ini dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di kecamatan-kecamatan yang tumbuh dan berkembangnya kota baru sebagai sebuah fenomena baru perkotaan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Kelapadua, Curug dan Legok di sebelah timur dan selatan Kabupaten Tangerang dimana telah tumbuh dan berkembang kota baru Lippo Village, Bumi Serpong Damai, Summarecon Serpong dan Paramount. Keempat kota baru tersebut tumbuh sejak tahun delapan puluhan atau Sembilan puluhan yang sampai hari ini masih terus tumbuh dan berkembang sebagai sebuah kota mandiri. Fenomena kora baru dan mandiri ini sekaligus menggantikan keberadaan desa-desa dengan ciri pertanian yang kental di masa lalu.

Menurut Ryaas Rasyid (1996) pada dasarnya ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Dipandang dari sisi etika, keberhasilan seseorang pemimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengembang tiga fungsi hakiki tersebut. Pada penelitian yang akan dilaksanakan ini ketiga fungsi hakiki pemerintahan ini akan dijadikan variable ruang lingkup operasional

Tabel 1. Ruang Lingkup / Oeprasional Kajian

NO	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Peran Pemerintah Daerah : Fungsi Pemerintah (Ryaas Rasyid, 2001)	- Fungsi Pelayanan	- Pendidikan - Kesehatan - Lapangan Pekerjaan - Pertumbuhan Ekonomi - Perumahan Layak Huni
		- Fungsi Pembangunan	- Mengatasi Kemiskinan - Mengatasi Pengangguran
		- Fungsi Pemberdayaan	- Pranata Keluarga - Pranata Ekonomi - Pranata Pendidikan - Pranata Politik - Pranata Agama - Gotong Royong - Musyawarah untuk Mufakat - Tolong Menolong - Taat/Patuh - Toleransi - Komunal - Akulturasi - Menghargai Alam - Menghargai Adat Istiadat
2.	Dampak Pembangunan Kota Baru (Perubahan Sosial) (Soerjono Soekanto- Budi Sulistyowati, 2014)	➤ Kelembagaan Masyarakat	
		➤ Sistem Sosial	
		➤ Sistem Nilai	
		➤ Sikap	
		➤ Pola Perilaku	

(Sumber: Pengolahan Data.

kajian. Variabel lainnya yaitu Perubahan Sosial dengan lima indikator yaitu: kelembagaan masyarakat, sistem sosial, sistem nilai, sikap dan pola perilaku.

Sedangkan kerangka pemikiran kanjian ini dibangun berdasarkan Pendekatan Kapabilitas untuk Berfungsi (*capability to function*) Amartya Sen, teori Pembangunan Dudley Seers (2015)/Soedjatmoko/Bintoro Tjokroamidjyo-Mustopadidjaya (1990), Teori Perubahan Sosial Soerjono Soekanto – Budi Sulistyowati (2014) dan teori fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, pembangunan dan Pemberdayaan (Ryaas Rasyid, 2001), sebagaimana digambarkan pada gambar 1.

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, dapat diambil kesimpulan hipotesa kerja kajian bahwa peran Pemerintah Daerah dapat menanggulangi perubahan sosial akibat dampak pembangunan kota baru menuju masyarakat sejahtera.

Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Dampak Pembangunan Kota Baru

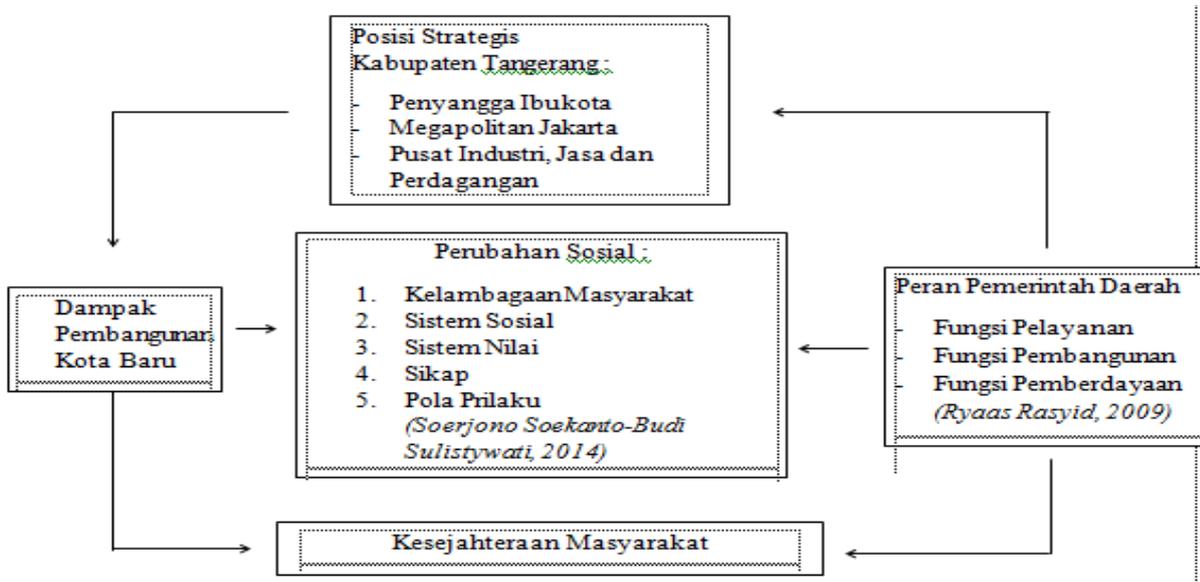
Upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi dampak pembangunan kota baru terhadap masyarakat setempat adalah sebagai berikut:

(1) Membuka Lapangan Pekerjaan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang setiap tahun menggelontorkan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan seperti Program Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Permasalahan-permasalahan yang paling mengemukakan di bidang ketenagakerjaan

yaitu: Program pelatihan kerja belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi profesi; Adanya informasi kesempatan kerja pada sektor formal tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pencari kerja yang tersedia (tidak *link and match*); Permasalahan di dalam hubungan industrial pada umumnya adalah belum berfungsinya secara optimal sarana hubungan industrial; Masih banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- Meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat;
- Melakukan jejaring komunikasi antar pelaku usaha dengan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum pelatihan sesuai dengan pasar kerjadan melakukan kerja sama penempatan untuk peserta pelatihan;
- Melakukan pengembangan penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja melalui bursa tenaga kerja online, kesempatan kerja dan Wira Usaha Baru (WUB), pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), padat karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- Meningkatkan pengetahuan pengusaha dan pekerja tentang peraturan ketenagakerjaan serta mendorong terbentuknya sarana hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja di perusahaan;
- Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan unjuk rasa.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

(2) Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Terpadu (Gebrak Sipintar)

Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut bernama Gebrak Sipintar atau Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Terpadu. Bentuk program ini berupa pemberian stimulus kredit usaha tanpa agunan bagi masyarakat bawah yang benar-benar membutuhkan. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah melalui penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Usaha Mikro dapat dikategorikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ciri Usaha Mikro adalah aset yang tidak lebih dari Rp. 50 juta dan omset maksimal Rp. 300 juta. Usaha Kecil berkisar pada aset Rp. 50-500 juta dan omset antara Rp. 300 juta-2,5 miliar. Sedangkan Usaha Menengah berada pada kategori aset Rp. 500 juta – 10 miliar dan omset pada kisaran Rp. 2,5-50 miliar. Sampai dengan tahun 2017 anggota Gebrak Sipintar yang terfasilitasi kredit mikro untuk pengembangan usaha mencapai 3.587 UMKM.

(3) Kebijakan Penyediaan Perumahan

Kebijakan penyediaan pemukiman dan perumahan sedari awal sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi Kabupaten Tangerang sebagai daerah penyangga ibukota. Khusus dalam penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman, Pemerintah Kabupaten Tangerang mempunyai program Gebrak Pakumis atau Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin.

Program ini digagas sebagai upaya menanggulangi pemukiman kumuh seperti rumah tidak layak huni, sarana dan prasarana yang buruk dan kurang memadai sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Fokus utama dari program ini adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh.

Program ini juga didukung penuh oleh kelompok masyarakat seperti koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal maupun internasional seperti IUWASH (*Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene*). IUWASH adalah fasilitasi untuk meningkatkan perluasan akses terhadap air minum dan layanan sanitasi yang aman di Indonesia yang

didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID. Tujuan utama IUWASH adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). Program Gebrak Pakumis ini sampai dengan akhir tahun 2017 sudah memperbaiki sebanyak 1017 rumah kumuh di 66 kawasan.

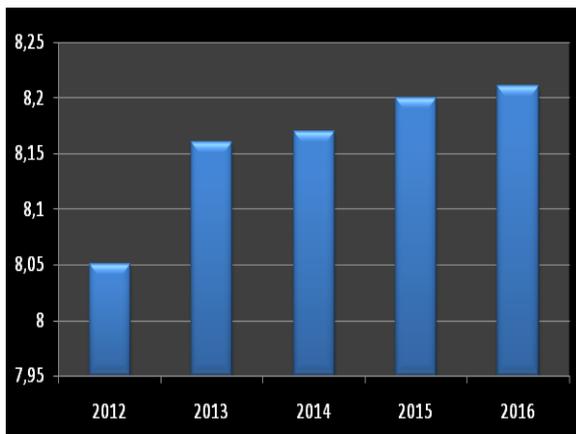
(4) Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang cerdas adalah salah satu visi Kabupaten Tangerang 2013-2018 yang juga berujung kepada pengentasan kemiskinan, karena hanya dengan pendidikan yang baik kemiskinan dapat dihapuskan. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk bidang pendidikan karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Sebagai contoh pada tahun 2017 saja dianggarkan sebesar Rp. 549.392.192.803 untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di bidang pendidikan.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pendidikan diantara dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh peserta didik pada umur tertentu di masa depan. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dimulai pada usia 7 tahun ke atas selaras dengan Program Wajib Belajar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016) telah terjadi pergerakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dari semula berada di angka 11,18 tahun pada 2012 menjadi 12,11 tahun pada 2016. HLS dapat dikategorikan sebagai indikator proses pendidikan yang berlangsung bagi para peserta didik. Intervensi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan partisipasi peserta didik untuk meningkatkan HLS pada akhirnya akan meningkatkan RLS. Hasil intervensi tersebut terlihat dalam gambar di bawah ini:

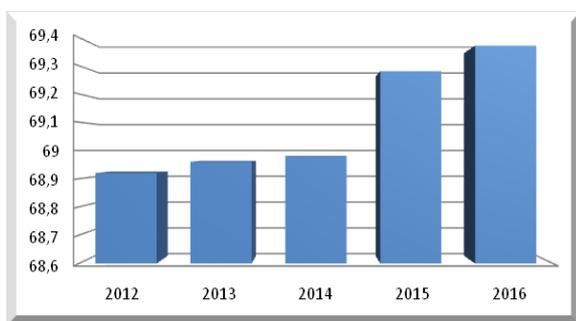
(5) Peningkatan Kualitas Hidup / Kesehatan Masyarakat

Angka harapan hidup seseorang dapat menggambarkan derajat kesehatan seseorang atau masyarakat dimana semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 adalah 69,37 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan yang cukup baik sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber: Buku Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Bupati-Wakil Bupati Periode 2013-2018

Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bupaten Tangerang Tahun 2012-2016



Sumber: Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati-Wakil Bupati Periode 2013-2018

Gambar 3. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tangerang 2012-2016

(6) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang berbanding lurus dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat. Demikian berlaku sebaliknya. Pada awal tahun 2012 LPE Kabupaten Tangerang cukup menjanjikan berada di angka 6,17% bahkan naik menjadi 6,89% di tahun 2013 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tahun 2014 masih berada kisaran 6,12%, tetapi mulai menurun pada tahun 2015 akibat pelemahan ekonomi global dan bertahan di posisi 6,32% pada tahun 2016.

Walaupun demikian LPE Kabupaten Tangerang masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,02% pada tahun yang sama. Sejatinya, LPE Kabupaten Tangerang selalu lebih tinggi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan rata-rata nasional. Artinya, daerah ini selalu lebih maju dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. PDRB Kabupaten Tangerang masih didominasi oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 39,66%, disusul kemudian oleh kontribusi Konstruksi sebesar

12,14%. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sangat signifikan sebesar 11,53% terhadap PDRB karena jumlah kendaraan yang beredar di Kabupaten Tangerang sebanyak 1.400.000-an kendaraan. Jumlah ini terbesar di Provinsi Banten. Belum lagi bentuk-bentuk perdagangan besar dan eceran.

Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Dampak Pembaguan Kota Baru

Seperti halnya DKI Jakarta sebagai ibukota dan pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tangerang juga menjadi destinasi menarik tujuan urbanisasi karena ketersediaan lapangan pekerjaan. Tapi di lain sisi, tingkat persaingan para pencari kerja juga semakin meningkat, terlebih rendahnya tingkat keterampilan masyarakat lokal menjadi problematika tersendiri. Sehingga akumulasi para pencari kerja setiap tahun semakin meningkat.

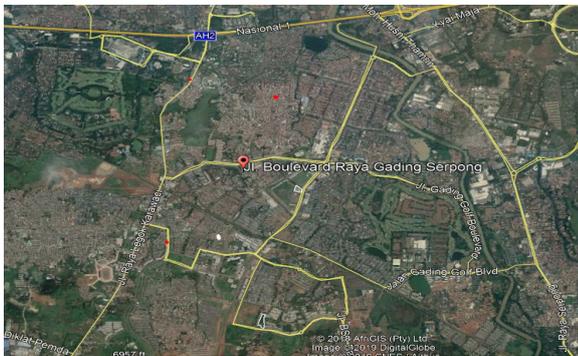
Pada tahun 2015, dari jumlah penduduk 3.370.594 jiwa terdapat 66,17 persen nya merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK- 15 tahun ke atas). Dari jumlah tersebut 62,46 persen nya merupakan angkatan kerja. Apabila dirunut lima tahun ke belakang, Penduduk Usia Kerja terus mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2011 sebesar 2,04 jiwa, tahun 2012 sebesar 2,09 jiwa, tahun 2013 sebesar 2,24 jiwa, tahun 2014 sebesar 2,34 jiwa, tahun 2014 sebesar 2,34 jiwa dan tahun 2015 sebesar 2,42 jiwa. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2016).

Paling menarik untuk dicermati adalah angka Tingkat Pengangguran dimana pada tahun 2011 sebesar 14,42%, tahun 2012 sebesar 11,46%, tahun 2013 sebesar 11,94%, tahun 2014 sebesar 8,45% dan 2015 sebesar 9,0%. Besarnya Tingkat Pengangguran tersebut juga tercermin dari orang yang Mencari Pekerjaan sebesar 204.358 jiwa pada tahun 2011, 152.235 jiwa pada tahun 2012, 173.798 jiwa pada tahun 2013, 124.024 jiwa pada tahun 2014 dan 136.277 jiwa pada tahun 2015. Walaupun adanya fluktuasi dan cenderung menurun, besaran Tingkat Pengangguran dan orang Mencari Pekerjaan karena jumlahnya yang masih relatif besar menjadi sangat menarik untuk diteliti dalam kajian ini.

Sebagai wilayah industri dan pemukiman kemacetan di Kabupaten Tangerang tidak berbeda dengan DKI Jakarta. Karena batas sebagai Wilayah Penyangga ibukota (*buffer area*) sudah tidak lagi terlihat. Semua sudah menyatu menjadi bagian besar dari Megapolitan Jakarta. Sehingga kemacetan menjadi pemandangan setiap hari di hampir seluruh pelosok wilayah ini.

ini merupakan daerah perkebunan dan persawahan dengan budaya pertanian yang sangat kental. Namun seiring waktu dengan kebutuhan akan pemukiman yang sangat besar di DKI Jakarta membuat daerah ini berkembang menjadi pemukiman tertata dan bersifat mandiri.

Bersebelahan dengan Kota Baru BSD City telah tumbuh dan berkembang Kota Baru Gading Serpong yang keduanya telah menjadi suatu kawasan mega cities yang terintegrasi dari aspek tata ruang dan jaringan jalan. Kondisi awal daerah yang terletak di Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Kelapadua ini tidak jauh berbeda dengan tetangganya BSD City berupa lahan perkebunan dan pertanian baik yang dikuasai negara maupun masyarakat. Namun kawasan ini telah berkembang menjadi kota baru dengan fasilitas pendidikan modern seperti Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Surya Institute, Matana University dan sekolah-sekolah menengah seperti Al Azhar, Tarakanita, SMAK Penabur, Jakarta Nanyang School, Pahoa dan lain-lain. Sekolah-sekolah bertaraf nasional dan internasional tersebut merepresentasikan keragaman etnis dan agama. Al Azhar sebagai simbol masyarakat muslim, SMAK Penabur dan Tarakanita sebagai simbol kristen dan bahkan sekolah Pahoa mengajarkan dwi bahasa sebagai bahasa standar sekolah (Inggris dan Mandarin), sebagaimana dalam gambar satelit dibawah ini :



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tangerang 2019

Gambar 5. Kota Baru Gading Serpong

Demikian pula Kota baru Lippo Village terletak sangat strategis di tengah Kabupaten Tangerang, disisi jalan tol Jakarta-Merak dan berbatasan dengan Kota Tangerang. Kota baru yang berada di Kecamatan Kelapadua dan Curug ini sudah berkembang cukup lama dan menjadi salah satu *icon* Kabupaten Tangerang dengan keberadaan Supermall Karawaci, RS Siloam dan Sekolah Pelita Harapan (SPH) dan Universitas Pelita Harapan (UPH) yang bertaraf

internasional. Pemukiman kota baru Lippo Village ini terbilang eksklusif dengan keberadaan rumah-rumah super mewah yang dihuni oleh tokoh-tokoh pengusaha papan atas Indonesia. Di sekitar kawasan bisnis kota baru ini sudah terbangun super blok apartemen dan hotel yang menyiratkan kemajuan dan menampilkan wajah moderen Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan namanya, kota baru ini merupakan pusat bisnis group Lippo –salah satu group usaha terdepan di Indonesia, dengan fasilitas pendaratan pesawat helikopter (*helipad*) dan bahkan kawasan ini pernah dicoba untuk menjadi ajang sirkuit balap mobil jalan raya A1. Hal sama di pembangunan Kota Baru Citra Raya terletak di tengah Kabupaten Tangerang dan berada di sebelah selatan jalan raya Serang yang membelah Kabupaten Tangerang dan menghubungkan jalur tradisional Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kota baru yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah ini dahulunya berupa perkebunan dan lahan pertanian.

Kotabaru-kotabaru tersebut awalnya tumbuh dan berkembang di sebelah Timur seperti Bumi Serpong Damai (BSD), Lippo Village, Summarecon Serpong dan Paramount. Namun saat ini juga sedang berkembang di sepanjang jalur jalan Raya Serang dan jalan tol Jakarta-Merak seperti kawasan pemukiman Citra Raya dan Suvama Sutera. Namun sesungguhnya masa depan Kabupaten Tangerang berada di sepanjang pantai utara dimana kawasan ini akan terbangun pemukiman-pemukiman baru berskala besar. Ketika hakekat pembangunan seharusnya di fokuskan kepada penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengetahuan dan berketerampilan, seperti juga daerah-daerah lain di Indonesia, persoalan ini juga menerpa Kabupaten Tangerang. Tingginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bukan jaminan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Paling tidak seperti yang diperkirakan para ahli, akan selalu ada kesenjangan antara masyarakat kaya-miskin karena aspek SDM. Kemiskinan di Kabupaten Tangerang walaupun setiap tahun semakin menurun, namun masih ada sekitar 5,29% rakyat miskin atau sekitar 183.959 orang miskin pada tahun 2016. Fenomena ini menjadi alarm bagi Pemerintah Daerah untuk mencari solusi efektif mengatasi ini. Selengkapnya data kemiskinan seperti dalam table 2.

Untuk lebih jelasnya pembahasan terhadap temuan dan penilaian kualitatif dalam kajian ini dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 2. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase penduduk di bawah GK
2012	326.724	5,71
2013	335.291	5,78
2014	351.789	5,26
2015	372.431	5,71
2016	405.902	5,29

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang 2019

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan kajian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat sudah cukup kuat dengan upaya yang beragam, akan tetapi perlu harus diakui bahwa belum ada program khusus untuk penanggulangan dampak pembangunan kota baru di Kabupaten Tangerang. Disinilah peran pemerintah daerah dalam pembangunan kota baru menghadirkan kulturasi global di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk mengimbangi ketimpangan pembagunan kota baru terhadap masyarakat setempat.
2. Pembangunan kota baru di Kabupaten Tangerang hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

Tabel 3. Penilaian Kualitatif Temuan Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Penilaian		Kesimpulan	
			Kualitatif	%		
Peran Pemerintah Daerah	1. Fungsi Pelayanan	1) Pendidikan	Fungsi Optimal , Dana Sangat Besar	85%	Positif	
		2) Kesehatan	Fungsi Optimal, Dana Relatif Besar Fasilitas Lengkap	95%	Positif	
		3) Lapangan Pekerjaan	Metode Masih Konvensional	75%	Positif	
	2. Fungsi Pembangunan	1) Pertumbuhan Ekonomi	Sangat Baik, diatas ekonomi Nasional	95%	Positif	
		2) Perumahan Layak Huni	Program yang Tepat Sasaran	90%	Positif	
	3. Fungsi Pemberdayaan	1) Kemiskinan	Masih Perlu Kerja Keras Menuntas Rantai Kemiskinan	65%	Positif, Perlu Percepatan	
		2) Pengangguran	Masih Perlu Inovasi Baru Memberantas Pengangguran	65%	Positif, Perlu Inovasi Baru	
	Dampak Pembangunan Kota Baru (Perubahan Sosial)	1. Kelembagaan Masyarakat	1) Pranata Keluarga	Berubah Cara Pandang	80%	Positif, (Menuju Masyarakat Modern)
			2) Pranata Ekonomi	Berubah Cara Pandang	75%	Positif, (Menuju Masyarakat Modern)
3) Pranata Pendidikan			Berubah Cara Paradigma	80%	Positif, (Menuju Masyarakat Modern)	
4) Pranata Politik			Berubah Radikal	30%	Negatif, (Transaksional)	
5) Pranata Agama			Tidak Berubah	80%	Positif	
2. Sistem Sosial		1) Gotong Royong	Melupakan	30%	Negatif, (Hilang)	
		2) Masyarakat untuk Mufakat	Berubah Radikal	40%	Negatif, (Hilang)	
3. Sistem Nilai		1) Tolong menolong	Tidak Berubah	95%	Positif	
		2) Taat/Patuh	Kurang Taat/Patuh	60%	Negatif, (Berkurang)	
		3) Toleransi	Kurang Toleransi	55%	Negatif, (Berkurang)	
4. Sikap		1) Komunal	Berubah Orientasi	80%	Positif	
		2) Akulturasi	Menerima	90%	Positif	
5. Pola Perilaku		1) Menghargai alam	Kurang Menghargai	50%	Negatif	
		2) Menghargai Adat Istiadat	Melupakan	30%	Negatif, (Luntur)	
Penilaian 0% - 60% : Negatif 61% - 100% : Positif						

Sumber : Pengolahan Data 2019

setempat, sehingga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat terdampak kota baru masih tertinggal yaitu pembangunan kota baru bukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Walhasil, pembagunan kota baru berubah secara radikal kelembagaan masyarakat, sistem sosial dan pola perilaku masyarakat. Perubahan radikal tersebut tidak semuanya berarti negatif, tapi justru sebagian berarti sebaliknya positif. Pembangunan kota baru menggeser sistem nilai masyarakat dalam ketaatan/kepatuhan dan tanangan baru akan nilai toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Oekan S dan Dede Mulyanto, 2019, *Isu-isu Pembangunan-Pengantar Teoritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Tangerang, 2013, *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2012*, Tangerang.
- Bungin, Burhan, 2012, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Braam, Geert P.A, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, (Penerjemah: JRG. Djopari), DF&DC, Bogor.
- Brewster, R. Wallace. 1963. *Government in Modern Society: With Emphasis on American Institutions*. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Caiden, Gerald E. 1991. *Administrative Reform Comes of Age*. New York: Walter de Gruyter.
- Cheema, G.S & Rondinelli, D.A. 1987. *Decentralizing Governance : Emerging Concept and Practice*. Brooking Institution Press. Washington DC.
- Creswell, John W, 2014, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, 2010, *Sejarah Kabupaten Tangerang*, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tangerang.
- Fauzi, Herman, 2000, *Banten dalam Peralihan: Sebuah Konstruksi Pemikiran Tentang Paradigma Baru Pembangunan Daerah*, Yayasan-an Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup Fathul Insani (YASFI), Tangerang.
- Field, John, 2018, *Modal Sosial, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Gadjong, Agussalim Andi . 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Jakarta: Kencana, 2004.
- Geertz, Clifford, 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Goldthorpe, J.E, 1992, *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hakim, Abdul, 2009, *Ekonomi Pembangunan*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joesoef, Daoed, 2012, http://cetak.kompas.com/read/2012/04/30/04061447/pembangunan_pendekatan_budaya
- Jhingan, M.L., 2016, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali pers, Jakarta.
- Jurnal Parlemen, 2013, *Pendekatan Kebudayaan Bisa Jadi Solusi Masalah Intoleransi*.
- Labolo, Muhadam, 2008, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Penembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2014, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2013, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2013-2018*, Tangerang.

- Prasetyantoko, A (ed), Setyo Budiantoro, Sugeng Bahagijo, 2012, *Pembangunan Inklusif – Prospek dan Tantangan Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2004. *Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan* dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press. Jakarta.
- _____, 2001. *Pemerintahan Yang Amanah*. Yasrif Watampone. Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perspektif Perubahan Sosial*, 2016, Pustaka Setia, Bandung.
- Salim, Emil, 1999, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, 1993, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sastra, Eka, 2017, *Kesenjangan Ekonomi – Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*, Expose, Jakarta.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung.
- Sobarna, Cece, Tien Wartini dan Taufik Ampera, 2004, *Bahasa dan Sastra Daerah di Kabupaten Tangerang: Pengkajian Budaya dan Nilai-nilai Tradisional*, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Tim Pusat Studi Sunda, Tangerang.
- Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat – Merangkai Sebuah Kerangka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soetomo, Sugiono, 2009, *Urbanisasi dan Morfologi –Proses Perkembangan Peradaban& Wadah Ruang Fisiknya, Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahyuti, 2007, *Konsep dan Strategi Pendekatan Kultural dalam Pembangunan Pertanian: Studi Kasus Pembangunan Pertanian di Thailand*. http://geocities.com/syahyuti/pendekatan_pendekatankultural_pembangunanpertanian.pdf
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, 1990, *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*, Haji Masagung, Jakarta.
- Todaro, Michael P and Stephen Smith, 2009, *Economic Development*, Addison-Wesley, Boston.